

Sejarah Korupsi di Indonesia: Dari Penjajahan hingga Reformasi

Tujuan pembelajaran pada presentasi ini adalah:

- Memahami sejarah korupsi di Indonesia dari masa ke masa.
- Mengetahui bagaimana korupsi berkembang dalam berbagai rezim pemerintahan.
- Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di era reformasi.

Presentasi ini akan merujuk pada sumber referensi dari peneliti terkemuka, seperti Robert Cribb dan Vedi R. Hadiz, serta laporan dari Transparency International Indonesia.



by Eling Wening Pangestu

Definisi dan Dampak Korupsi

Definisi Korupsi

Transparency International:
Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

UU No. 31 Tahun 1999: Perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara.

Dampak Korupsi

Ekonomi: Menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan.

Politik: Melemahkan demokrasi, menciptakan oligarki.

Sosial: Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.





Korupsi pada Zaman Penjajahan & Kemerdekaan

Zaman Penjajahan Belanda (1600-an - 1942)

Korupsi di tubuh VOC menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Pejabat kolonial melakukan penyalahgunaan dana pajak dan eksploitasi sumber daya.

Zaman Jepang (1942-1945)

Korupsi lebih berbentuk eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja pribumi untuk kepentingan perang. Sistem kerja paksa (romusha) dijalankan tanpa kontrol transparansi.

Awal Kemerdekaan (1945-1950-an)

Pemerintahan masih lemah dalam mengelola keuangan negara. Banyak oknum pejabat melakukan penyalahgunaan wewenang karena kurangnya sistem pengawasan.

Korupsi pada Zaman Orde Lama (1945-1966)



Ciri-ciri Korupsi

Maraknya penyalahgunaan bantuan luar negeri, dominasi kekuasaan yang kurang transparan, dan ekonomi negara yang tidak stabil menyebabkan peluang korupsi semakin besar.



Kasus Korupsi Besar

Skandal **Bantuan Dana Asing** untuk proyek industri yang dikorupsi pejabat tinggi, serta korupsi dalam **proyek nasionalisasi perusahaan Belanda** setelah kemerdekaan.



Kebijakan & Dampak

Pemerintah membentuk lembaga antikorupsi pertama di Indonesia pada 1963, namun ketidakstabilan ekonomi akibat korupsi berkontribusi pada jatuhnya Soekarno.

Korupsi pada Zaman Orde Baru (1966-1998)

Ciri-ciri Korupsi

Sentralisasi kekuasaan di tangan Soeharto dan kroni-kroninya, penguasaan ekonomi oleh kelompok tertentu (konglomerat), serta dominasi korupsi di sektor minyak, perbankan, dan proyek pembangunan besar.

Kasus Korupsi Besar

Skandal Pertamina (1970-an) yang menyebabkan kerugian miliaran dolar, serta praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di dalam pemerintahan dan bisnis.

Dampak

Utang negara membengkak karena korupsi di sektor industri dan keuangan. Reformasi 1998 terjadi akibat akumulasi ketidakpuasan terhadap korupsi dan otoritarianisme.



Korupsi Pasca Reformasi (1998 - Sekarang)

1 Harapan vs. Realita

Reformasi membawa harapan baru dalam pemberantasan korupsi, namun korupsi masih marak terjadi di berbagai sektor.

2 Kasus Korupsi Besar

Kasus Century (2008): Skandal bailout perbankan merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun. **Kasus e-KTP (2017):** Penyalahgunaan proyek e-KTP yang melibatkan pejabat tinggi negara.

3 Dampak

Lahirnya KPK (2003) sebagai lembaga pemberantas korupsi. Peningkatan skor **Corruption Perceptions Index (CPI)** namun masih tergolong buruk.



Dampak Korupsi terhadap Pembangunan



Ekonomi

Korupsi mengurangi investasi dan merusak iklim bisnis.



Pendidikan

Dana BOS sering disalahgunakan oleh oknum pejabat.



Kesehatan

Penyalahgunaan dana BPJS dan alat kesehatan.



Contoh Kasus

Korupsi bansos COVID-19 oleh pejabat Kementerian Sosial (2020).



Upaya Pemberantasan Korupsi

Penguatan Lembaga Antikorupsi

KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian diperkuat dalam menangani kasus korupsi.

Transparansi Anggaran Publik

Pengelolaan anggaran publik ditingkatkan melalui e-government.

Peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam pelaporan tindak korupsi terus ditingkatkan.

Kasus Korupsi Besar di Indonesia

138T

BLBI (1998)

Penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh bank-bank swasta untuk pemulihan ekonomi, merugikan negara Rp 138 triliun.

706M

Hambalang (2010)

Korupsi dalam proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, dengan suap dalam pengadaan dan mark-up biaya konstruksi.

2.3T

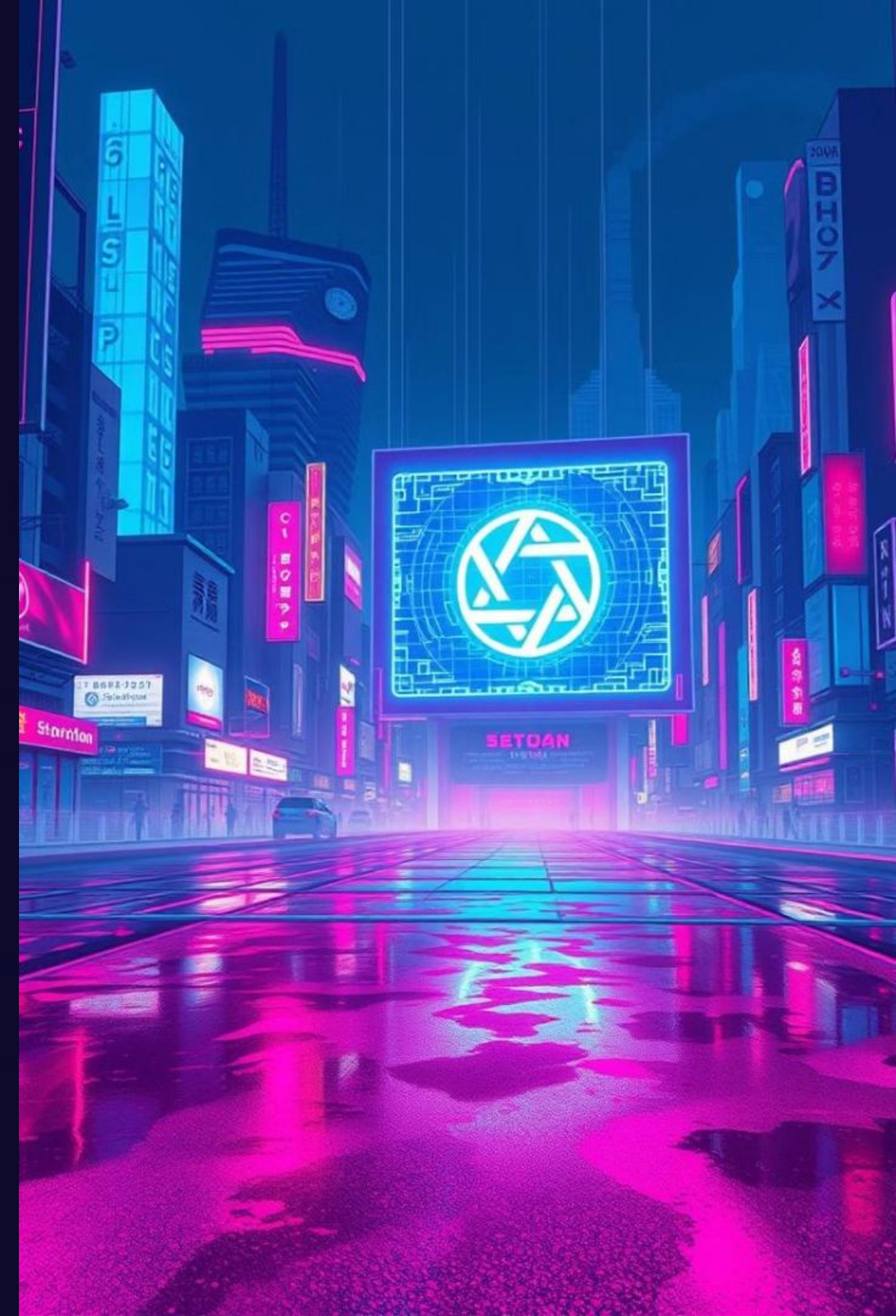
e-KTP (2017)

Pengelembungan dana proyek kartu identitas elektronik (e-KTP), dengan aliran dana ke anggota DPR.

16.8T

Jiwasraya (2020)

Manipulasi investasi perusahaan asuransi BUMN yang merugikan nasabah hingga Rp 16,8 triliun.





Kesimpulan dan Diskusi

Kesimpulan

Korupsi telah menjadi bagian dari sejarah politik dan ekonomi Indonesia. Reformasi membawa perubahan dalam pemberantasan korupsi, namun tantangan masih besar. Peran masyarakat dalam pengawasan sangat penting.

Diskusi

Bagaimana strategi terbaik untuk mencegah korupsi di masa depan?
Apa tantangan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?